



**PENUTUPAN LOKALISASI
DI WILAYAH DESA DOROKANDANG: DAMPAK DAN
KENDALA DALAM MASYARAKAT KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh:
Ikayanti
NIM 3301415003

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2019**

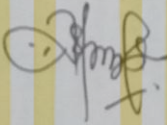
PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

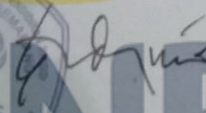
Hari : Ramis
Tanggal : 20 / 6 / 2019

Pembimbing Skripsi


Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP. 197707152001122008

Mengetahui:

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan


Dr. Tjani, M.Si.
NIP. 196211201987021001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

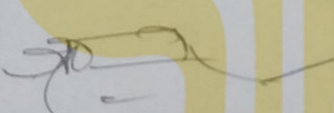
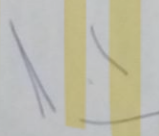
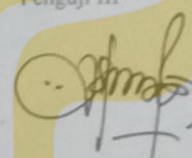
ii

PENGESAHAN KELULUSAN

PENGESAHAN KELULUSAN


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Juli 2019

Penguji I	Penguji II	Penguji III
		
Dr. Eko Handoyo, M.Si NIP.196406081988031001	Dr. AT. Sugeng Priyanto, M.Si NIP.196304231989011002	Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si NIP.197707152001122008

Mengetahui,

Dekan FIS UNNES


UNNES
Dr. Moh. Solihatul Mustofa, M.A
NIP.196308021985031001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

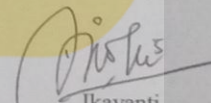
iii

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 17 Mei 2019


Ikayanti

Nim. 3301415003

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sebagai bagian individu dari masyarakat, sudah selayaknya kita memiliki kepekaan terhadap keadaan di sekeliling kita. Menjadi pribadi yang baik adalah pilihan. Bersikaplah baik kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang tidak menyukai kita. Karena pada dasarnya kita hidup untuk bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita ”

Penulis (IKAYANTI)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, khususnya ibu yang tanpa lelah mendoakan dalam setiap langkah saya selama ini.
2. Keluarga besar Mbah Wastun.
3. Sahabat saya Duwur Endek Squad (Nurvita Fauziah, Mada Rizka Romadlona dan Pawuri Locananta).
4. Sahabat saya 5 Meter (Anjar Sari, Tia Ulfana, Alfiyah dan Ahmad Fatkhul Niam).
5. Gugus Latih Ilmu Sosial 2016 dan 2017
6. Sahabat-sahabat PPKn angkatan 2015, rekan PPL 2018 SMA N 8 Semarang, dan KKN 2018 Ds. Sumberejo.
7. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Rasa syukur alhamdulillah selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penutupan Lokalisasi di Wilayah Desa Dorokandang (Dampak dan Kendala dalam Masyarakat) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang”. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan dukungan dengan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang atas pemberian izin penelitian.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan arahan dalam pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Puji Lestari, S.Pd, M.Si, pembimbing skripsi yang telah membimbing dan membantu memberikan sumbangan pemikiran dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama di bangku perkuliahan.

6. Bapak Suwito, Kepala Desa Dorokandang yang telah memberikan izin penelitian di Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
7. Bapak Anda, selaku kaur umum pemerintah desa Dorokandang yang telah membantu selama penelitian
8. Seluruh pegawai pemerintah desa Dorokandang yang telah menerima saya dengan baik selama proses penelitian.
9. Kedua orang tua, khususnya Ibu saya yang tak pernah lelah mendoakan dan mencurahkan segala usaha untuk saya.
10. Keluarga besar Mbah Wastun. Terimakasih atas segala dukungan baik doa dan semua yang telah diberikan.
11. Terimakasih sahabat saya Duwur Endek Squad (Nurvita Fauziyah, Mada Rizka Romadlona, dan Pawuri Locananta) yang telah memberi warna selama di bangku perkuliahan. Semoga persahabatan kita langgeng.
12. Terimakasih untuk sahabat saya Dwi Hermawan dan Daniar Solekha atas support dan motivasinya.
13. Terimakasih untuk teman-teman Kos Pasadena, khususnya Cahya Dini Larasati partner kos yang setia mendengar keluh kesah saya selama ini.
14. Rekan-rekan PPL di SMA N 8 Semarang, khususnya Radika Ayu Erriawati, partner segalanya.

15. Keluarga besar KKN Keilmuan Tahun 2018 Desa Sumberjo,
terimakasih 45 yang sangat berkesan.

16. PPKn Angkatan 2015 yang telah memberikan doa dan dukungan.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai penanganan masalah-masalah sosial yang ada di setiap daerah.

Semarang, April 2019

Penulis



SARI

Ikayanti.2019. *Penutupan Lokalisasi di Wilayah Desa Dorokandang:Dampak dan Kendala dalam Masyarakat Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Puji Lestari S.Pd., M.Si. 113 Halaman.

Kata Kunci: Penutupan Lokalisasi, Dampak, Kendala

Salah satu bentuk upaya dalam meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dari adanya praktik pelacuran atau prostitusi adalah dengan cara melegalkan lokalisasi. Keberadaan lokalisasi selain membatasi segala ruang gerak dari praktik pelacuran atau prostitusi, di sisi lain juga menjauhkan dari pengaruh buruk terhadap remaja dan anak-anak. Namun pada kenyataannya, keberadaan lokalisasi meskipun dianggap oleh sebagian pihak menjadi salah satu upaya meminimalisir dampak buruk dari adanya praktik prostitusi, namun pada kenyataannya masih menimbulkan beberapa pro dan kontra terhadap keberadaan lokalisasi itu sendiri. Bagi masyarakat yang kontra terhadap keberadaan lokalisasi, desakan penutupan lokalisasi menjadi upaya untuk mendukung pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam menangani penyakit sosial tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Faktor pendukung penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang; (2) Dampak Penutupan Lokalisasi terhadap masyarakat di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang; (3) Kendala Penutupan Lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Fokus Penelitian ini mengenai Penutupan Lokalisasi di Wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Balaidesa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang serta kawasan eks lokalisasi di Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang berdasarkan beberapa faktor dengan faktor penguat faktor sosial dan ekonomi. Dampak dari adanya penutupan lokalisasi sangat di rasakan khususnya bagi para eks mucikari yaitu terkait dampak ekonomi dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Sedangkan dampak sosial masyarakat adalah adanya perubahan aktivitas sehari-hari bagi eks mucikari yang bertahan hidup dengan berjualan baik makanan maupun berjualan di pasar. Kendala yang dialami oleh pemerintah Desa Dorokandang dalam penutupan lokalisasi meliputi kendala sebelum penutupan, kendala selama proses penutupan serta kendala *pasca* penutupan lokalisasi.

Saran, perlu adanya kerjasama baik dari pemerintah Desa Dorokandang, masyarakat desa setempat, pemerintah Kabupaten Rembang serta Satpol PP dalam pengawasan di wilayah eks lokalisasi agar tidak terjadi praktik prostitusi di kawasan tersebut secara sembunyi-sembunyi.

ABSTRACT

Ikayanti.2019. Localization Closure in Dorokandang Village Area: Impacts and Constraints in the Community of Lasem District, Rembang Regency. Essay. Department of Politics and Citizenship, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Advisor Puji Lestari S.Pd., M.Sc. 113 Pages.

Keywords: Closure of Localization, Impact, Constraints

One form of effort in minimizing the adverse effects arising from the practice of prostitution or prostitution is by legalizing localization. The existence of localization in addition to limiting all movement space from the practice of prostitution or prostitution, on the other hand also keeps away from the bad influence on adolescents and children. But in reality, the existence of localization, although considered by some parties to be one of the efforts to minimize the adverse effects of the practice of prostitution, but in reality still raises some pros and cons to the existence of localization itself. For people who are contradictory to the existence of localization, the insistence on closing localization is an effort to support the local government or village government in dealing with these social diseases. The purpose of this study is to find out (1) supporting factors of closing localization in the area of Dorokandang Village, Lasem District, Rembang Regency; (2) Impact of Closing Localization on the community in the area of Dorokandang Village, Lasem District, Rembang Regency; (3) Closing Constraints Localization in the area of Dorokandang Village, Lasem District, Rembang Regency.

The focus of this research is the closure of localization in the Dorokandang Village Area, Lasem District, Rembang Regency. This study used qualitative research methods. The research location was in Balaidesa Dorokandang, Lasem District, Rembang Regency and the former localization area in Dorokandang Village, Lasem District, Rembang Regency. Collecting data through interviews, observation, and documentation. Test the validity of the data using the triangulation method. Stages of data analysis are data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification.

The results showed that the background of the localization closure in the Dorokandang Village of Lasem District, Rembang District was based on several factors with reinforcing factors of social and economic factors. The impact of the closure of localization is very felt, especially for ex-pimps, which is related to the economic impact in fulfilling everyday life. While the social impact of the community is a change in daily activities for ex-pimps who survive by selling food and selling on the market. The constraints experienced by the Dorokandang Village government in closing the localization included obstacles before closure, constraints during the closing process and constraints post closure of localization.

Suggestions, there is a need for cooperation from the Dorokandang Village government, local village communities, the Rembang Regency government and the Satpol PP under supervision in ex-localization areas so that prostitution practices in the region do not occur secretly.

DAFTAR ISI

PENUTUPAN LOKALISASI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Istilah	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	12
A. Deskripsi Teoretis	12
1. Perubahan Sosial	12
2. Prostitusi sebagai Penyakit Sosial	13
3. Lokalisasi.....	16
4. Dampak Penutupan Lokalisasi	21
5. Kendala Penutupan Lokalisasi.....	23
6. Masyarakat	24
B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan	25
C. Kerangka Berpikir	37
BAB III	41

METODE PENELITIAN	41
A. Latar Penelitian	41
B. Fokus Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	44
E. Uji Validitas Data	48
F. Teknik Analisis Data	50
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
1. Gambaran Umum Wilayah Lokalisasi di Desa Dorokandang	54
2. Faktor pendukung penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang	60
3. Dampak penutupan lokalisasi terhadap masyarakat di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang	74
4. Kendala-kendala dalam penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang	82
B. Pembahasan	97
BAB V	107
PENUTUP	107
A. Simpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	56
Tabel 4.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Dorokandang	57



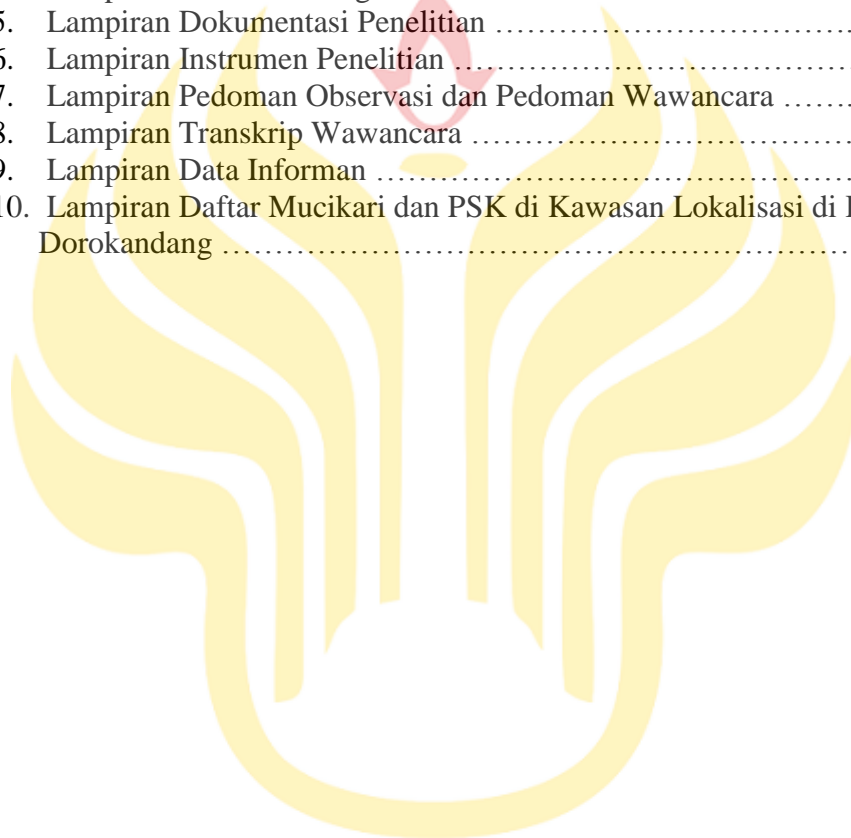
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Masalah Pasca Penutupan Lokalisasi	23
Gambar 3.1. Model John W. Creswell	45
Gambar 3.2. Komponen dalam analisis data (<i>interactive model</i>)	53
Gambar 4.1. Peta Wilayah Desa Dorokandang	55
Gambar 4.2. Kawasan Lokalisasi Berada di Jalur Pantura	56
Gambar 4.3. Kawasan Lokalisasi Berada di depan SMP N 1 Lasem	58
Gambar 4.4. Penutupan Lokalisasi oleh Bupati Rembang	60
Gambar 4.5. Banner Larangan Prostitusi	63
Gambar 4.6. Pelatihan Batik bagi Eks Mucikari	69
Gambar 4.7. Penutupan Lokalisasi yang dihadiri Bupati dan pihak lain...	75
Gambar 4.8. Wawancara dengan salah satu Eks Mucikari	79
Gambar 4.9. Foto salah satu Eks Mucikari Berjualan Makanan di Rumah ...	88
Gambar 4.10. Kondisi Komplek Lokalisasi <i>Pasca ditutup</i>	89

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran SK Bimbingan	114
2. Lampiran Surat Izin Observasi	115
3. Lampiran Surat Izin Penelitian	116
4. Lampiran Surat Keterangan Sudah Penelitian	117
5. Lampiran Dokumentasi Penelitian	118
6. Lampiran Instrumen Penelitian	123
7. Lampiran Pedoman Observasi dan Pedoman Wawancara	152
8. Lampiran Transkrip Wawancara	168
9. Lampiran Data Informan	206
10. Lampiran Daftar Mucikari dan PSK di Kawasan Lokalisasi di Desa Dorokandang	207



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit sosial dalam masyarakat yang tua usianya (Yayan, 2015:2). Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha (Kartono, 2009: 177).

Praktik pelacuran atau prostitusi tumbuh dan berkembang di Indonesia, bahkan tidak ada daerah di Indonesia yang tidak mengenal praktek prostitusi atau pelacuran (Zulfiqar,dkk, 2014:1199). Pelacuran atau Prostitusi menjadi salah satu masalah sosial yang memerlukan penanganan yang tepat dalam menghentikan penyebarannya.

Salah satu bentuk upaya dalam meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dari adanya praktik pelacuran atau prostitusi adalah dengan cara melegalkan lokalisasi. Keberadaan lokalisasi merupakan pilihan yang paling realistis untuk membatasi ruang gerak dan penyebaran pengaruh buruk dari bisnis tersebut terhadap kehidupan masyarakat secara luas (Fatkhullah,dkk, 2013:12). Lokalisasi secara umum dipahami sebagai pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan. Sedangkan pada konteks pelacuran atau prostitusi, lokalisasi dipahami sebagai sebuah tempat penampungan wanita tunasusila (WTS) yang merupakan kawasan pelacuran yang berisi wisma *esek-esek*, kafe dangdut, dan panti pijat yang

berjejer rapi di kawasan jarak tersebut. Lokalisasi merupakan suatu kawasan yang dilegalkan oleh pemerintah untuk menampung atau mengakomodir para WTS agar mudah dipantau dan dikendalikan serta tidak berada di tengah-tengah pemukiman warga (Zulfiqar,dkk, 2014:1199). Adanya lokalisasi lebih memudahkan pemerintah dalam memantau serta menangani penyakit-penyakit seperti HIV-AIDS serta penyakit menular lainnya.

Kemunculan lokalisasi merupakan salah satu gejala sosial yang termasuk penyakit masyarakat yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di samping gelandangan (tuna wisma, tuna karya), penyalahgunaan narkotika dan alkoholisme, prostitusi, penyakit jiwa, tuna netra, kriminal, dan korelasi antara penyakit masyarakat dan kriminalitas (Hermanto:283).

Maskawi dan Matali (dalam Yayan, 2015:3) mengungkapkan bahwasannya keberadaan lokalisasi telah memunculkan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat yaitu adanya peningkatan ekonomi seperti pedagang, tukang becak, tukang ojek, pembantu atau tukang cuci pakaian, tukang pijat, dan penjual jamu. Secara tidak langsung bahwa adanya kawasan lokalisasi telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga sekitar lokalisasi. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat lebih memandang lokalisasi bermakna negatif dan memberikan pengaruh buruk bagi perkembangan moral anak-anak di sekitar lokalisasi. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat yang kontra

terhadap adanya lokalisasi menginginkan bahwa lebih baik lokalisasi itu ditutup.

Keberadaan lokalisasi meskipun dianggap oleh sebagian pihak menjadi salah satu upaya meminimalisir dampak buruk dari adanya praktek prostitusi, namun pada kenyataannya masih menimbulkan beberapa pro dan kontra terhadap keberadaan lokalisasi itu sendiri. Desakan untuk menutup selalu menjadi salah satu alasan utama. Desakan masyarakat, alim ulama dan tokoh masyarakat kerap mengalahkan dukungan keberadaan (Zulfiqar, dkk, 2014:1203).

Bagi sebagian masyarakat penutupan lokalisasi merupakan langkah tepat untuk mengurangi adanya penyakit menular atau demoralisasi pada remaja di sekitar lokalisasi, namun bagi pihak yang menggantungkan hidup di sekitar lokalisasi ini menjadi semacam ancaman kehidupannya terutama bagi pelaku usaha, juru parkir, tukang ojek dan toko di sekitar lokalisasi (Yayan, 2015:17).

Keberadaan lokalisasi yang selama ini sebagai penopang bagi mucikari maupun PSK, tentu dengan keputusan penutupan yang dilakukan oleh pihak setempat akan memberikan perubahan kehidupan sosial khususnya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Penutupan lokalisasi menjadi suatu upaya yang solutif bagi penanganan kasus prostitusi apabila memerhatikan semua pihak khususnya bagi penghuni lokalisasi agar setelah penutupan lokalisasi tidak menimbulkan permasalahan baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Alex Yayan S dalam skripsi pada tahun 2015. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang dampak yang ditimbulkan akibat adanya penutupan lokalisasi. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa menunjukkan temuan riset bahwa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat penutupan lokalisasi sangat dirasakan oleh pelaku usaha yang menguntungkan hidupnya di daerah lokalisasi. Selain itu terdapat dua respons dari masyarakat yaitu pihak yang setuju dan pihak yang tidak setuju atas penutupan lokalisasi tersebut. Pihak yang setuju mengungkapkan bahwa penutupan lokalisasi akan menimbulkan etos kerja yang lebih baik di lingkungan masyarakat, meminimalisir demoralisasi pada remaja dan anak-anak Puger. Sedangkan pihak yang tidak setuju menganggap bahwa adanya penutupan lokalisasi hanya akan menciptakan prostitusi liar di wilayah tersebut. Penutupan lokalisasi meskipun dianggap sebagai upaya dalam penanganan penyakit sosial berupa praktik prostitusi, namun pada kenyataannya masih menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang memerlukan langkah solutif bagi pembuat keputusan penutupan tersebut. Dampak penutupan lokalisasi tersebut yang kemudian harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah solutif baik bagi pelaku prostitusi dalam hal ini mucikari maupun pelaku usaha yang selama ini memanfaatkan kawasan lokalisasi.

Penelitian lain yang relevan yaitu terkait kebijakan penutupan lokalisasi yang ditulis oleh Dewi Rokhmah dan Khoiron pada tahun 2014.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dampak transisi pelayanan sosial penutupan tempat untuk pekerja seks komersial dan penutupan prostitusi terhadap program penanggulangan HIV/AIDS. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan penutupan lokalisasi berdasarkan SK Bupati Kabupaten Jember No. 188.45/39/012/2007 tentang Penutupan Tempat Layanan Sosial dan Penutupan Prostitusi di Kabupaten Jember terhadap program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember. Dari adanya Surat Keputusan Bupati tentang penutupan tempat layanan sosial transisi untuk pekerja seks komersial di Puger Kabupaten Jember meliputi jumlah layanan sosial transisi untuk pekerja seks komersial ilegal bertambah dan menyebar di wilayah Kabupaten Jember. Hal ini diikuti dengan permasalahan sulitnya pembinaan layanan kesehatan dan upaya komunikasi perubahan perilaku terhadap PSK. Setiap keputusan penutupan lokalisasi selalu menimbulkan dampak baik terhadap pelaku prostitusi itu sendiri maupun pihak-pihak yang selama ini memanfaatkan kawasan lokalisasi sebagai tempat usaha.

Data terbaru Kementerian Sosial (Kemensos) sampai dengan tahun 2017, Kemensos berhasil mendukung penutupan lokalisasi dengan merehabilitasi dan memulangkan 20.000 lebih penghuni lokalisasi tersebut. Dari jumlah 168 , yang sudah ditutup berjumlah 118 lokalisasi dan saat ini tersisa 41 lokalisasi yang belum ditutup. Penutupan lokalisasi dengan *support* anggaran dari Kementerian Sosial berjumlah 66

lokalisasi sedangkan dukungan dari APBD berjumlah 52 lokalisasi. Penutupan lokalisasi tersebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan program “2019 Indonesia Bebas Prostitusi”.

Penutupan lokalisasi akhir-akhir ini mulai digencarkan dengan tetap memperhatikan nasib para pelaku prostitusi dengan diberikannya modal berwirausaha. Upaya penutupan lokalisasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari pemerintah daerah setempat. Setiap daerah memiliki upaya masing-masing dalam menangani persoalan lokalisasi salah satunya adalah dengan menutup praktik pelacuran atau prostitusi tersebut.

Pemerintah Desa Dorokandang bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Lasem dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Rembang kaitannya dalam menangani penyakit masyarakat berupa praktik lokalisasi, secara resmi pada tanggal 27 Juni 2017 menutup kawasan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Praktik prostitusi di kawasan Desa Dorokandang diungkapkan sudah berlangsung sangat lama, bahkan dari penuturan salah satu warga kawasan lokalisasi telah ada sebelum adanya Desa Dorokandang.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber serta observasi awal yang dilakukan, penutupan lokalisasi oleh pemerintah Desa Dorokandang bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Lasem dan elemen lain secara resmi telah menutup lokalisasi di kawasan desa Dorokandang tersebut pada tanggal 27 Juni 2017, di mana kawasan lokalisasi di desa

Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang selama ini menjadi tempat prostitusi rencananya dialihfungsikan menjadi *homestay*. Kawasan lokasi Desa Dorokandang berada di pinggir jalan raya Pantura, sehingga selama ini dimanfaatkan oleh banyak supir truk untuk singgah dan beristirahat. Dengan ditutupnya lokasi di kawasan Desa Dorokandang, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berencana untuk mengubah kawasan prostitusi tersebut menjadi *homestay* agar tetap digunakan oleh para supir beristirahat tanpa *embel-embel* kawasan prostitusi.

Keberhasilan penanganan penyakit masyarakat di Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang harapannya dijadikan pintu masuk untuk penertiban segala bentuk penyakit masyarakat di daerah lain. Penutupan lokasi di Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang merupakan salah satu upaya untuk membersihkan Kabupaten Rembang khususnya kawasan Kecamatan Lasem dari citra buruk karena adanya tempat-tempat prostitusi yang selama ini tumbuh dan berkembang di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian mengenai latar belakang, dampak serta kendala-kendala bagi masyarakat di kawasan Desa Dorokandang Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang perlu dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor pendukung penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang ditutup?
2. Bagaimana dampak penutupan lokalisasi terhadap masyarakat di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana kendala-kendala dalam penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Faktor pendukung penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
2. Dampak penutupan lokalisasi terhadap masyarakat di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
3. Kendala-kendala dalam penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan teoretis mengenai studi sosial penutupan lokalisasi yang berdampak baik secara sosial, ekonomi, bagi masyarakat serta dijadikan bahan pertimbangan terhadap keputusan dalam penanganan penyakit sosial khususnya praktik pelacuran atau prostitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi penulis digunakan sebagai sarana khasanah pengetahuan mahasiswa PPKn agar lebih memahami fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat untuk memberi informasi dan pengetahuan mengenai penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- c. Hasil penelitian tentang penutupan lokalisasi di Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang ini untuk mengetahui penanganan masalah sosial berupa penutupan lokalisasi yang ada di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Hal ini tentunya dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Dorokandang serta Pemerintah Kabupaten Rembang untuk dilakukan upaya penanganan yang lebih baik lagi dalam penanganan masalah sosial di lingkungan Kabupaten Rembang khususnya masalah lokalisasi prostitusi .

E. Batasan Istilah

Agar penelitian yang akan dilakukan lebih terarah diperlukan adanya batasan-batasan yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun batasan-batasan penggunaan istilah yaitu :

1. Penutupan

Penutupan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengakhiran atau penyudahan. Penutupan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyudahan dari kawasan lokalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap adanya lokalisasi sehingga secara resmi lokalisasi tersebut dilarang beroperasi lagi.

2. Lokalisasi

Lokalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara sederhana diartikan sebagai pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan. Lokalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “suatu kawasan yang dilegalkan oleh pemerintah untuk menampung atau mengakomodir para Wanita Tuna Susila (WTS) agar mudah dipantau dan dikendalikan serta tidak berada di tengah-tengah pemukiman warga” (Zulfiqar,dkk, 2014:1199). Lokalisasi yang dimaksud dalam penelitian yang akan dilakukan adalah tempat pelacuran di kawasan Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

3. Dampak

Menurut KBBI dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Secara etimologis, dampak berarti

pelanggaran, tubrukan, atau benturan. Oleh karena itu, dampak pada sistem sosial budaya dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap sistem sosial budaya, tubrukan terhadapnya ataupun benturan. Hal itu berarti bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu terjadi masalah-masalah yang mengganggu berfungsinya sistem sosial budaya tersebut (Soekanto dan Sulistyowati, 2013:378).

Dampak yang dimaksud dalam penelitian yang dilakukan adalah pengaruh yang kuat disertai akibat (baik dari sisi sosial maupun ekonomi) dari adanya penutupan lokalisasi di kawasan Desa Dorokandang Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

4. Kendala

Menurut KBBI, kendala diartikan sebagai halangan, rintangan, dan gendala. Kendala yang dimaksud dalam penelitian yang dilakukan adalah rintangan-rintang yang dialami oleh pemerintah Desa Dorokandang dalam rangka penutupan lokalisasi di kawasan Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

5. Masyarakat Desa Dorokandang Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian yang dilakukan adalah warga Desa Dorokandang Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang khususnya warga desa 12B yaitu mereka yang berada dekat kawasan lokalisasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoretis

1. Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Berbicara tentang perubahan, kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu; kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu (Sztompka,2005:3). Lebih lanjut Sztompka (2005:3) mengungkapkan bahwa konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: (1) perbedaan; (2) pada waktu berbeda; dan (3) di antara keadaan sistem sosial yang sama.

Definisi lain terkait perubahan sosial menurut Harper (dalam Martono, 2013:5) adalah sebagai pergantian (perubahan) yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Masyarakat sebagai sistem sosial dalam pandangan struktural fungsional memiliki kemampuan yang fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi karena pada dasarnya masyarakat mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dan mengadaptasi dirinya dengan sesuatu yang berasal dari dalam maupun dari luar (Martono,2013:10).

Terkait penutupan lokalisasi dilihat dari teori perubahan sosial, tentu memiliki beberapa aspek yang dapat dikaji diantaranya perubahan sosial yang terjadi *pasca* penutupan lokalisasi khususnya bagi pelaku prostitusi dalam hal ini mucikari. Perubahan-perubahan sosial tentu juga dirasakan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berada di dekat kawasan lokalisasi.

2. Prostitusi sebagai Penyakit Sosial

Patologi sosial merupakan semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal (Kartono, 2017:1).

Selanjutnya bahwa yang disebut sebagai masalah sosial ialah 1) Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama). 2) Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak. Tingkah laku yang dianggap sebagai tidak cocok, melanggar norma dan adat-istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial (Kartono, 2017:2).

Masalah-masalah sosial pada hakikatnya juga merupakan fungsi-fungsi struktural dari totalitas sistem sosial, yaitu berupa produk atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari satu sistem sosio-kultural (Kartono, 2017:4). Masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat diantaranya: perjudian, korupsi, kriminalitas, pelacuran, dan mental *disorder*.

Pelacuran sebagai masalah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan (Kartono, 2017:207).

Pelacuran sebagai salah satu profesi yang sangat tua usianya, yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Pelacuran selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Pelacuran selalu menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi (Kartono, 2017:208).

Fenomena praktik pelacuran merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk dipertimbangkan dan diperdebatkan. Mulai dari dulu sampai sekarang masalah pelacuran merupakan masalah sosial yang sangat sensitif menyangkut peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama (Oktaviari dan Handoyo, 2017:1).

Barry dan Bullough (dalam Koentjoro, 1996:42) prostitusi merupakan masalah yang menyangkut harkat, martabat, dan nilai kaum wanita. Prostitusi bukan saja berkaitan dengan masalah kualitas moral pelakunya. Secara medik prostitusi akan menyebabkan penyakit kelamin seperti halnya HIV/AIDS. Ibu-ibu yang tertular penyakit ini dapat melahirkan anak-anak yang berkelainan fisik, sehingga prostitusi dapat menimbulkan masalah dalam kualitas generasi yang akan datang.

Lestari (dalam Kusumastuti, 2009:20), mengungkapkan bahwasannya penyebab pelacuran sebenarnya bukan tunggal

melainkan cenderung kompleks. Seperti hubungan dalam keluarga yang tidak baik, pendidikan rendah, kemiskinan, masa depan tidak jelas, tekanan penguasa, hubungan seksual terlalu dini, pergaulan bebas, kurang penanaman nilai agama serta perasaan dendam dan benci kepala laki-laki. Pelacuran menjadi permasalahan kompleks yang ada di masyarakat dan senantiasa menimbulkan pro dan kontra.

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran menurut Kartono (dalam Kusumastuti, 2009:22) diantaranya: menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit, merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, mendemoralisasi lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber, dan berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika.

Yahman (dalam Kusumastuti, 2009:23) terhadap masalah pelacuran ini, pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup melalui Departemen Sosial. Bentuk perhatian tersebut misalnya diwujudkan dalam pengadaan dan penyelenggaraan panti-panti rehabilitasi wanita. Selain itu pembinaan yang telah dilakukan terhadap para pelacur dengan segala jenis keterampilan perlu diimbangi dengan kemungkinan penyaluran tenaga mereka.

Dari pengertian-pengertian di atas, menurut peneliti bahwasannya prostitusi merupakan aktivitas yang melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat yaitu berupa aktivitas relasi seks yang bebas dengan masing-masing pihak diuntungkan baik bagi para PSK

mendapatkan imbalan uang dan pihak lain mendapatkan kepuasan seks. Prostitusi menjadi permasalahan sosial yang hingga kini belum mendapatkan solusi yang tepat dalam setiap penanganannya. Prostitusi senantiasa menjadi fokus pada objek sosial maupun keagamaan.

3. Lokalisasi

a. Pengertian Lokalisasi

Lokalisasi secara umum dapat dikatakan sebagai pemusatan suatu kegiatan pada wilayah yang terbatas, Daldjoeni (dalam Pratama:125). Pendapat lain, menurut Pasha (dalam Pratama:125) mengungkapkan bahwa lokalisasi adalah pemusatan suatu kegiatan pada wilayah yang terbatas, sehingga akan menambah fungsi wilayah yang bersangkutan.

Lokalisasi merupakan suatu kawasan yang dilegalkan oleh pemerintah untuk menampung atau mengakomodir para Wanita Tuna Susila (WTS) agar mudah dipantau dan dikendalikan serta tidak berada di tengah-tengah pemukiman warga (Zulfiqar,dkk, 2014:1199)

Lokalisasi itu pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang berlampu merah, yang dikelola oleh mucikari atau geromo (Kartono, 2015:254).

Di tempat lokalisasi tersebut disediakan segala perlengkapan tempat tidur, kursi tamu, pakaian, dan alat berhias. Juga tersedia macam-macam gadis dengan tipe karakter dan suku bangsa yang berbeda. Disiplin di tempat-tempat lokalisasi tersebut diterapkan dengan ketat misalnya tidak boleh mencuri uang langganan, dilarang merebut langganan orang lain, tidak boleh mengadakan

janji di luar, dilarang memonopoli seorang langganan, dan lain-lain. Wanita-wanita pelacur itu harus membayar pajak rumah dan pajak obat-obatan, sekaligus juga uang keamanan agar mereka terlindung dan terjamin identitasnya” (Kartono, 2015:254).

Pelacuran itu tumbuh dengan pesatnya di kota-kota yang tengah berkembang. Yaitu meluas dengan cepat oleh pendirian kompleks-komplek industri baru, kemunculan berpuluh-puluh sekolah, universitas dan akademi (Kartono, 2015:257).

Dari pengertian-pengertian lokalisasi yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa menurut peneliti lokalisasi merupakan pemusatan suatu aktivitas kegiatan agar dapat mudah dipantau dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. Seperti halnya pemusatan kegiatan prostitusi dalam satu wilayah agar mudah dipantau dan dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan misalnya penyebaran penyakit kelamin karena di kawasan lokalisasi mendapatkan pantauan serta kegiatan pemeriksaan rutin dari pihak-pihak terkait. Lokalisasi menjadi salah satu solusi dalam mengurangi dampak buruk dari aktivitas prostitusi.

b. Jenis Prostitusi dan Lokalisasi

Menurut Soedjono (dalam Munawaroh, 2010) Pekerja Seks Komersial merupakan wanita yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual laki-laki siapapun yang menginginkannya, dimana wanita tersebut menerima sejumlah uang atau barang. Beberapa sebab terjadinya pelacuran diantaranya: rendahnya taraf

kehidupan ekonomi rakyat, banyaknya pengaruh barang-barang mewah sehingga mendorong orang untuk memilikinya, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, dan meningkatnya film-film dan VCD porno serta gambar-gambar cabul di masyarakat dimana penggemarnya sebagian besar adalah remaja sekolah (Munawaroh, 2010:71).

Prostitusi sejatinya bukan hal baru. Bisnis *human trafficking* alias perdagangan manusia ini hanya mengalami pergeseran kebiasaan dari konvensional ke *online*. Pelanggaran yang dilakukan PSK itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam Pasal 4 Ayat 2 dijelaskan, tindakan menjajakan diri secara konvensional maupun *online* telah melanggar aturan.

Kecanggihan teknologi informasi dan didukung dengan kecepatan jaringan internet membuat segala sesuatunya cepat berubah. Demikian pula dengan perkembangan dunia malam dan bisnis pelacuran yang mengalami peningkatan dan perubahan dengan cepat.

Saat ini memungkinkan untuk bisnis prostitusi secara *offline* dipandang sudah tidak efektif lagi. Bahkan terkesan sangat membahayakan dirinya sendiri, karena harus senantiasa keluar malam untuk mencari pelanggan. Sehingga duni prostitusi ini juga akhirnya beralih dari sistem *offline* menjadi ke sistem *online*.

Menurut Kartono (2015:253) menurut jumlahnya, *prostitutue* dapat dibagi dalam:

- a. *Prostitutue* yang beroperasi secara individual merupakan *single operator* atau;
- b. *Prostitutue* yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi, mereka itu tidak bekerja sendirian, akan tetapi diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi.

Sedangkan menurut penggolongan atau lokasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi:

- a. *segresi* atau *lokalisasi*, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah lampu merah, atau petak-petak daerah tertutup;
- b. rumah-rumah panggilan (*call houses*, tempat *rendezvous*, *parlour*);
- c. di balik front organisasi atau di balik bisnis-bisnis terhormat. (apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus, dan lain-lain).

c. Tujuan Lokalisasi

Menurut Kartono (2015:254) menyebutkan tujuan lokalisasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dan adolesens dari pengaruh-pengaruh immoral dari praktik pelacuran. Juga menghindarkan gangguan-gangguan kaum pria hidung belang terhadap wanita-wanita baik;

- 2) Memudahkan pengawasan para wanita tunasusila, terutama mengenai kesehatan dan keamanannya. Memudahkan tindakan preventif dan kuratif terhadap penyakit kelamin;
- 3) Mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap para pelacur, yang pada umumnya selalu menjadi pihak yang lemah;
- 4) Memudahkan bimbingan mental bagi para pelacur, dalam usaha rehabilitasi dan resosialisasi. Kadang kala juga diberikan pendidikan keterampilan dan latihan-latihan kerja, sebagai persiapan untuk kembali ke dalam masyarakat biasa. Khususnya diberikan pelajaran agama guna memperkuat iman, agar bisa tabah dalam penderitaan;
- 5) Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para wanita tunasusila yang benar-benar bertanggung jawab, dan mampu membawanya ke jalan benar. Selanjutnya, ada dari mereka itu diikutsertakan dalam usaha transmigrasi, setelah mendapat suami, keterampilan dan kemampuan hidup secara wajar. Usaha ini bisa mendukung program pemerataan penduduk dan memperluas kesempatan kerja di daerah baru.

Poin utama adanya lokalisasi adalah untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dan adolesens dari pengaruh-pengaruh immoral dari praktik pelacuran dan memudahkan pengawasan para wanita tunasusila, terutama mengenai kesehatan dan keamanannya. Memudahkan tindakan preventif dan kuratif terhadap penyakit kelamin

d. Penutupan Lokalisasi

Penutupan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengakhiran atau penyudahan. Penutupan lokalisasi dapat diartikan sebagai suatu pengakhiran atau penyudahan kawasan lokalisasi sehingga tidak dapat digunakan sebagai praktik prostitusi. Tempat prostitusi di tengah masyarakat selalu mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Meski

demikian ada juga masyarakat yang mengambil keuntungan dari kawasan lokalisasi, seperti membuka jasa menjaga parkir kendaraan ojek, warung makan dan minuman. Namun demikian, desakan untuk menutup selalu menjadi salah satu alasan utama penutupan lokalisasi. Desakan masyarakat, alim ulama dan tokoh masyarakat kerap mengalahkan dukungan keberadaan lokalisasi (Zulfiqar, dkk,2014:1203). Penutupan lokalisasi menurut peneliti dapat diartikan sebagai penyudahan atau pengkahiran kawasan lokalisasi sehingga tidak dapat digunakan sebagai tempat kegiatan prostitusi. Penutupan lokalisasi dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor salah satunya adalah tuntutan dari masyarakat untuk menutup kawasan lokalisasi tersebut.

4. Dampak Penutupan Lokalisasi

Secara etimologis, dampak berarti pelanggaran, tubrukan, atau benturan. Oleh karena itu, dampak pada sistem sosial budaya dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap sistem sosial budaya, tubrukan terhadapnya ataupun benturan. Hal itu berarti bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu terjadi masalah-masalah yang mengganggu berfungsinya sistem sosial budaya tersebut (Soekanto dan Sulistyowati, 2013:378).

Dampak secara sederhana diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri baik dampak positif maupun negatif.

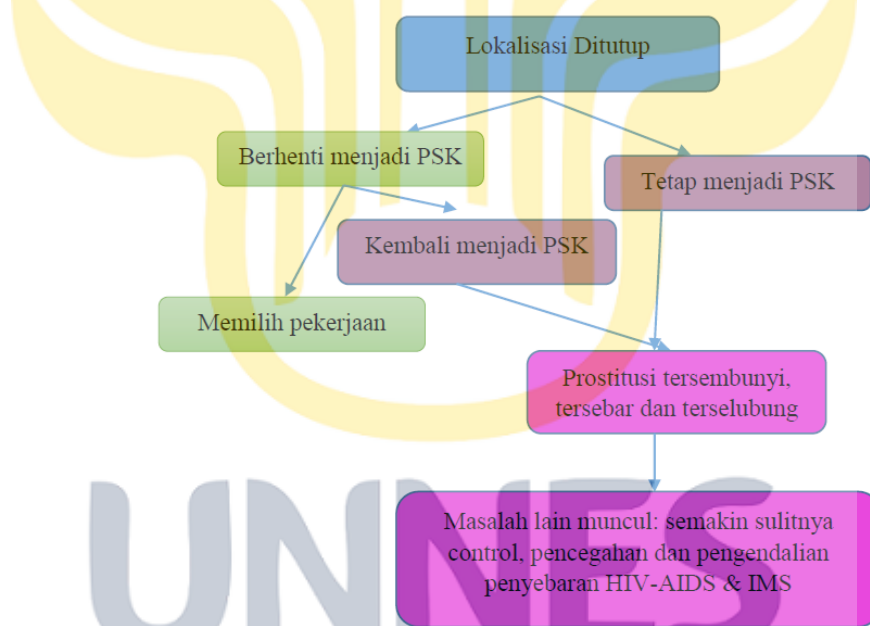
Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal (Kurnianto, 2017:7). Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Sedangkan menurut Scott dan Mitchell dalam (Kurnianto,2017:7-8) mengungkapkan bahwa dampak merupakan suatu transaksi sosial dimana seorang atau kelompok orang digerakkan oleh seseorang atau kelompok orang yang lainnya melakukan kegiatan sesuai dengan harapannya.

Dampak dari suatu keputusan biasanya terbagi menjadi dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosial menurut kamus besar diartikan sebagai pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial.

Dampak ekonomi dalam hal ini adalah perubahan-perubahan akibat dari penutupan lokalisasi yang berdampak pada pendapatan eks mucikari maupun perubahan pendapat serta pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari *pasca* penutupan lokalisasi.

Kaitannya dengan penutupan lokalisasi, keputusan penutupan lokalisasi senantiasa menimbulkan dampak dari berbagai aspek baik aspek sosial maupun ekonomi. Seperti halnya penutupan lokalisasi Dolly pada tanggal 28 Juni 2014 yang tetap menimbulkan kontroversi, terutama bagi mereka yang memperoleh penghasilan dari kawasan tersebut, seperti para PSK dan mucikari, serta para pedagang, tukang

ojek, atau tukang becak. Lokalisasi dianggap memberi penghidupan bagi masyarakat sekitar. Seperti berbagai praktek pengusuran lain, pemindahan pusat perekonomian dari satu tempat ke tempat lain selalu menimbulkan ketakutan bagi para pelaku usaha. Ketakutan itu terkait dengan ketidakyakinan mereka bahwa tempat yang baru mereka dapat memperoleh penghasilan yang setara dengan yang mereka terima di Dolly (Retnaningsih, 2014:11). Dampak ekonomi dari penutupan lokalisasi senantiasa menjadi tugas bagi para pembuat kebijakan untuk dicarikan solusi yang tepat dari dampak tersebut.



Gambar 2.1 Bagan Masalah *Pasca* Penutupan Lokalisasi

Sumber: UGM Public Health Symposium

5. Kendala Penutupan Lokalisasi

Menurut KBBI, kendala diartikan sebagai halangan, rintangan, dan gendala. Kendala berarti faktor atau keadaan yang membatasi,

menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala juga berarti kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Proses penutupan lokalisasi tentu mengalami kendala-kendala baik sebelum, selama maupun setelah resmi ditutup. Pihak-pihak yang selama ini memanfaatkan keberadaan lokalisasi menjadi salah satu kendala dalam upaya penutupan lokalisasi. Kendala-kendala tersebut yang selanjutnya perlu diupayakan solusi yang tepat bagi semua pihak yang terlibat khususnya bagi para eks mucikari.

6. Masyarakat

Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”, yang merujuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota sesuatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan yang utama, kelompok tadi disebut masyarakat setempat (Soekanto dan Sulistyowati, 2013:130).

Selanjutnya menurut Soekanto dan Sulistyowati (2013:132) dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat, dapat digunakan empat kriteria yang saling berpautan, yaitu:

- 1) Jumlah penduduk;
- 2) Luas, kekayaan penduduk daerah pendalaman;
- 3) Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat; dan

- 4) Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan.

B. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan

1. Dampak Sosial Ekonomi Penutupan Lokalisasi terhadap Masyarakat Puger Tahun 2007-2014

Penelitian ini ditulis oleh Alex Yayan S dalam Skripsi pada tahun 2015. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang dampak yang ditimbulkan akibat adanya penutupan lokalisasi. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa menunjukkan temuan riset bahwa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat penutupan lokalisasi sangat dirasakan oleh pelaku usaha yang menguntungkan hidupnya di daerah lokalisasi. Selain itu terdapat dua respons dari masyarakat yaitu pihak yang setuju dan pihak yang tidak setuju atas penutupan lokalisasi tersebut. Pihak yang setuju mengungkapkan bahwa penutupan lokalisasi akan menimbulkan etos kerja yang lebih baik di lingkungan masyarakat, meminimalisir demoralisasi pada remaja dan anak-anak Puger. Sedangkan pihak yang tidak setuju menganggap bahwa adanya penutupan lokalisasi hanya akan menciptakan prostitusi liar di wilayah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini merupakan penelitian yang sama-sama terkait dengan adanya penutupan lokalisasi. Perbedaan dari keduanya yakni penelitian yang dilakukan penulis menekankan pada

bagaimana faktor pendukung, dampak dan kendala adanya penutupan lokalisasi di wilayah desa Dorokandang.

2. Dampak Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi Untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi terhadap Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember

Penelitian ini ditulis oleh Dewi Rokhmah dan Khoiron pada tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dampak transisi pelayanan sosial penutupan tempat untuk pekerja seks komersial dan penutupan prostitusi terhadap program penanggulangan HIV/AIDS. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan penutupan lokalisasi berdasarkan SK Bupati Kabupaten Jember No. 188.45/39/012/2007 tentang Penutupan Tempat Layanan Sosial dan Penutupan Prostitusi di Kabupaten Jember terhadap program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember, dengan menggunakan metode diskriptif analitik menggunakan data sekunder dengan telaah dokumen yang bersumber dari laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember sejak Tahun 2004 sampai 2012. Dari adanya Surat Keputusan Bupati tentang penutupan tempat layanan sosial transisi untuk pekerja seks komersial di Puger Kabupaten Jember meliputi jumlah layanan sosial transisi untuk pekerja seks komersial ilegal bertambah dan menyebar di wilayah

Kabupaten Jember. Hal ini diikuti dengan permasalahan sulitnya pembinaan layanan kesehatan dan upaya komunikasi perubahan perilaku terhadap PSK.

Perbedaan dari keduanya yakni penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan bagaimana faktor pendukung, dampak, dan kendala adanya penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang sedangkan dalam penelitian dalam jurnal ini menekankan bagaimana dampak dari adanya penutupan lokalisasi terhadap program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember.

3. Analisis Kebijakan Penutupan KM 17 di Balikpapan

Penelitian ini ditulis oleh Janif Zulfiqar, Nur Fitriah, dan Enos Paselle pada tahun 2014. Tujuan dari penelitian adalah Menganalisis latar belakang dikeluarkannya SK 188.45-12/2013 oleh Pemerintah Kabupaten Balikpapan, bagaimana dukungan *stake holder* dan masyarakat terhadap penutupan Lokalisasi Km 17 Balikpapan serta bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan (SK 188.45-12/2013) tentang penutupan Lokalisasi Km 17 Karang Joang Balikpapan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang penutupan lokalisasi di suatu daerah. Hanya saja dalam jurnal penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis latar belakang dikeluarkannya SK 188.45-12/2013 oleh Pemerintah Kabupaten Balikpapan tentang penutupan Lokalisasi di KM 17 Kabupaten Balikpapan serta dukungan

dan implementasi dari kebijakan penutupan Lokalisasi KM 17 di Kabupaten Balikpapan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai faktor pendukung penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang oleh pemerintah desa setempat. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis juga menekankan pada dampak serta kendala dalam penutupan lokalisasi tersebut.

4. Inhibisi Prostitusi: Kajian Dampak Kebijakan Penutupan Lokalisasi Teleju oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Penelitian ini ditulis oleh M. Zainuddin pada tahun 2016. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa memang Pemerintah Kota Pekanbaru pada saat penutupan lokalisasi tersebut tidak siap terhadap efek yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Dampak dari penutupan lokalisasi Teleju, bermunculan praktik prostitusi di berbagai daerah dengan berbagai kedoknya. Selain berdampak terhadap sebaran tempat prostitusi, penutupan lokalisasi Teleju juga berdampak secara ekonomi. Pendapatan warga yang memanfaatkan untuk berjualan, otomatis penjualan mereka tidak ada yang membelinya.

Dalam hal kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi prostitusi, ialah dari segi isi kebijakan karena masih samarnya isi kebijakan, sehingga apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum dan sama sekali tidak ada.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis kaitannya dengan dampak penutupan lokalisasi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada faktor pendukung, kendala, dan dampak dari penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada Evaluasi kebijakan yang termuat dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

5. Dampak Lokalisasi Prostitusi terhadap Perilaku Remaja di sekitarnya

Penelitian ini ditulis oleh Abdi Sitepu pada tahun 2004. Dalam penelitian ini lebih menekankan dampak dari adanya bisnis prostitusi terhadap perkembangan masa remaja. Remaja memiliki ciri sebagai orang yang belum matang dalam berbagai hal, terutama dalam menerima dan menginternalisasi nilai-nilai, sehingga sangat rawan terhadap pengaruh. Dalam penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya membuktikan bahwa remaja yang seharusnya belum terlibat dalam aktivitas seks, ternyata sudah banyak terlibat dalam aktivitas seks. Lokalisasi merupakan kegiatan terorganisir dari seks komersial, yang berorientasi nilai-nilai ekonomis, sehingga para pelakunya akan berupaya mengajak remaja untuk terlibat. Usaha mengajak remaja untuk terlibat dalam bisnis seks sangat berbahaya mengingat remaja memiliki sifat antara lain mudah terpengaruh.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis kaitannya dengan praktek prostitusi . Hal yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan adalah lebih menekankan pada dampak yang ditimbulkan dari adanya penutupan , dalam hal ini dampak terhadap masyarakat sekitar.

6. Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) terhadap Masyarakat sekitar (studi Kasus di Jalan Soekarno-Hatta Km. 10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara)

Penelitian ini ditulis oleh Astry Sandra Amalia dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menggambarkan dampak yang ditimbulkan dari adanya tempat praktik prostitusi terhadap masyarakat sekitar Desa Purwajaya.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terkait lokalisasi prostitusi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dampak penutupan lokalisasi serta faktor pendukung penutupan serta kendala penutupan lokalisasi di Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

7. Dampak Praktik Prostitusi terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Lokalisasi Jarak-Dolly Kelurahan Putat Jaya

Penelitian ini merupakan penelitian kuliah lapangan yang ditulis oleh Mukhammad Fatkhullah, dkk. Penelitian ini memfokuskan dampak lokalisasi Jarak Dolly terhadap kehidupan sosial ekonomi

masyarakat Putat Jaya, di mana dampak sosial ekonomi dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar lokalisasi.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kaitannya keberadaan kawasan lokalisasi yang memberikan dampak sosial maupun ekonomi. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan adalah kaitannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berfokus pada penutupan lokalisasi terkait faktor pendukung penutupan lokalisasi, dampak dan kendala penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

8. Pola Interaksi Sosial PSK dengan Masyarakat Sekitar Lokalisasi dan Dampak yang ditimbulkannya di Lokalisasi Klubuk di Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

Penelitian ini ditulis oleh Syifa' Urohman F.R, Suwarno Winarno, dan Rusdianto Umar dengan tujuan penelitian diantaranya untuk mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dengan keberadaan lokalisasi Klubuk dan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pola interaksi para PSK di lokalisasi Klubuk di Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh, Jombang. Keberadaan lokalisasi Klubuk tersebut sedikit banyak meringankan beban perekonomian warga sekitar yang berprofesi sebagai pedagang yang membuka usaha warung dan toko.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait keberadaan lokalisasi. Bahwasannya keberadaan lokalisasi selain sebagai penopang perekonomian bagi pelaku prostitusi

juga sebagai penopang perekonomian bagi sebagian warga yang memanfaatkan sebagai kegiatan usaha. Hal ini tentu berdampak banyak ketika dilakukan penutupan lokalisasi baik secara ekonomi maupun sosial masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada faktor pendukung penutupan lokalisasi, dampak serta kendala dalam penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

9. Dampak Penutupan Lokalisasi Bangunsari terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Bangunsari Krembangan, Surabaya

Penelitian ini ditulis oleh Indra Pratama dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dampak penutupan lokalisasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Bangunsari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penutupan lokalisasi kondisi sosial masyarakat mengalami perubahan dalam hal mata pencaharian. Kondisi ekonomi berdampak pada turunnya tingkat pendapatan yang dulunya tergabung dalam kegiatan lokalisasi. Pendidikan yang rendah, membuat masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan di luar bidang lokalisasi, banyak dari mantan pelaku yang beralih menjadi wirausaha.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dampak penutupan lokalisasi baik dari segi sosial maupun ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti selain memfokuskan pada dampak sosial dan ekonomi dari penutupan

lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang, juga memfokuskan pada faktor pendukung dari penutupan tersebut.

10. Jaringan Sosial Mucikari Pasca Penutupan Lokalisasi *Dolly* Surabaya

Penelitian ini di tulis oleh Nanda Suliandi Oktaviari dan Pambudi Handoyo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan jaringan sosial *pasca* penutupan lokalisasi *Dolly*, Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi obyektif mucikari yang terlibat dalam jaringan sosial, mendeskripsikan pelaku yang terlibat dalma jaringan sosial, dan mendeskripsikan jaringan sosial mucikari *pasca* penutupan lokalisasi *Dolly*, Surabaya.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terkait penutupan lokalisasi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada faktor pendukung penutupan lokalisasi, dampak serta kendala-kendala penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada dampak penutupan lokalisasi terhadap kehidupan eks mucikari dari segi sosial maupun ekonomi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis juga mendeskripsikan dampak yang dirasakan oleh warga sekitar lokaliasasi *pasca* penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

11. Relokasi Pekerja Seks Komersial setelah Penutupan Lokalisasi Kedung Banteng

Penelitian ini ditulis oleh Dian Suluh Kusuma Dewi dan Yusuf Adam Hilman pada tahun 2019 dengan tujuan untuk mengupas teknis penutupan lokalisasi kedung banteng, yang menjadi lokalisasi 46 yang secara resmi ditutup. Secara umum proses penutupan telah selesai, namun kemudian muncul beberapa persoalan terkait keberadaan eks pekerja komersial yang sulit untuk dikendalikan, karena beberapa program tidak efektif, fakta di lapangan menunjukkan berbagai persoalan salah satunya dana kompensasi terhadap eks pekerja seks komersial yang sangat minim, meskipun demikian proses penutupan lokalisasi sudah berhasil dilaksanakan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terkait penutupan lokalisasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan bagaimana faktor pendukung penutupan lokalisasi disertai dampak yang khususnya dialami oleh eks mucikari maupun kendala-kendala selama proses penutupan lokalisasi.

12. Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi *Dolly*

Penelitian ini ditulis oleh Hartini Retnaningsih dengan tujuan untuk mengetahui dampak sosial penutupan lokalisasi *Dolly* Surabaya. Dengan berbagai persiapan dan potensi yang dimiliki, akhirnya Pemerintah Kota Surabaya berhasil menutup lokalisasi yang sangat terkenal dan terbesar di Asia Tenggara tersebut. Penutupan Lokalisasi

Dolly merupakan dilemma. Di satu sisi pelacuran bertentangan dengan ajaran agama dan bahkan dapat berdampak buruk terhadap perkembangan jiwa anak-anak di sekitarnya, sedangkan di sisi lain terdapat masalah ekonomi yang perlu turut dicarikan solusi terbaiknya.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terkait penutupan lokalisasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan bagaimana faktor pendukung penutupan lokalisasi disertai dampak yang khususnya dialami oleh eks mucikari maupun kendala-kedala selama proses penutupan lokalisasi.

13. Dampak Penutupan Lokalisasi terhadap Pendapatan Masyarakat sekitar Lokalisasi di Banyuwangi

Penelitian ini ditulis oleh Sutarmin dan Wiwik Budiarti dengan tujuan untuk mengetahui dampak daripada penutupan lokalisasi Padang Bulan, Turian, Gempol Porong, Bowo Waluyo, Padang Pasir dan LCM yang begitu terkenal di Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian ini bahwa dengan ditutupnya 11 lokalisasi tersebut maka berdampak pada bidang usaha, kegiatan ekonomi dan pendapatan usaha masyarakat di sekitar lokalisasi mengalami penurunan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terkait penutupan lokalisasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan bagaimana faktor pendukung penutupan lokalisasi disertai dampak yang khususnya dialami oleh eks mucikari maupun kendala-kedala selama proses penutupan lokalisasi.

14. Dampak Sosial dan Ekonomi Penutupan Lokalisasi Teleju terhadap Maraknya Panti Pijat dan Implikasinya terhadap Keresahan Masyarakat di Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilakukan oleh Mulia Sosiady dan Ermansyah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penutupan lokalisasi Teleju terhadap maraknya panti pijat di Kota Pekanbaru dan bagaimana implikasi kehadiran panti pijat tersebut terhadap keresahan masyarakat di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terkait penutupan lokalisasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan bagaimana faktor pendukung penutupan lokalisasi disertai dampak yang khususnya dialami oleh eks mucikari maupun kendala-kedala selama proses penutupan lokalisasi.

15. Kebijakan Walikota Surabaya dalam Penutupan Lokalisasi *Dolly* Surabaya Tahun 2014

Penelitian ini ditulis oleh Adis Puji Astuti dengan tujuan untuk mengetahui mengapa Pemerintahan Kota Surabaya mengeluarkan kebijakan untuk menutup Lokalisasi *Dolly* pada tahun 2014, bagaimana proses kebijakan penutupan lokalisasi *Dolly* oleh Pemerintahan Kota Surabaya pada tahun 2014 dan untuk mengetahui dampak dari kebijakan penutupan Lokalisasi *Dolly* pada tahun 2014.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terkait penutupan lokalisasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti

lebih menekankan bagaimana faktor pendukung penutupan lokalisasi disertai dampak yang khususnya dialami oleh eks mucikari maupun kendala-kedala selama proses penutupan lokalisasi.

C. Kerangka Berpikir

Dalam realita kehidupan sosial, manusia tidak terlepas dari suatu masalah. Arus globalisasi yang kuat disertai kultur baru yang lahir di era modernisasi telah membawa perubahan terhadap kondisi sosial masyarakat. Dewasa ini marak terjadi perilaku-perilaku negatif diantaranya, mulai dari tawuran remaja antarpelajar atau antarmahasiswa, seks bebas, aborsi, narkoba, hingga kasus penculikan melalui *facebook*. Perilaku-perilaku negatif tersebut sebagai bagian dari terjadinya degradasi moral yang terjadi saat ini.

Sebagai salah satu masalah sosial yang tua usianya, prostitusi menjadi salah satu masalah sosial yang memerlukan penanganan dari pemerintah atau pihak yang berwenang secara cepat dan tepat. Prostitusi atau pelacuran merupakan penyakit sosial yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, maupun norma hukum. Prostitusi merupakan penyakit sosial yang harus segera dihentikan penyebarannya. Keberadaan kawasan prostitusi tentu memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat sekitar, khususnya bagi perkembangan moral anak-anak.

Lokalisasi ada sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menangani dan memantau praktek prostitusi atau pelacuran. Praktek pelacuran yang selama ini berkembang di lingkungan lokalisasi membawa dampak buruk

bagi lingkungan sekitar salah satunya terhadap perkembangan moral anak. Keberadaan di tengah masyarakat juga menimbulkan citra buruk bagi daerah tersebut. Berangkat dari dampak buruk adanya praktek , setiap pemerintah memiliki kewenangan tersendiri dalam menangani keberadaan kawasan lokalisasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menutup praktik dengan tetap memerhatikan nasib para pelaku atau mucikari sebagai pihak yang merasa dirugikan.

Keberadaan lokalisasi meskipun dianggap oleh sebagian pihak menjadi salah satu upaya meminimalisir dampak buruk dari adanya praktek prostitusi, namun pada kenyataannya masih menimbulkan beberapa pro dan kontra terhadap keberadaan lokalisasi itu sendiri. Desakan untuk menutup selalu menjadi salah satu alasan utama. Desakan masyarakat, alim ulama dan tokoh masyarakat kerap mengalahkan dukungan keberadaan (Zulfiqar, dkk, 2014:1203).

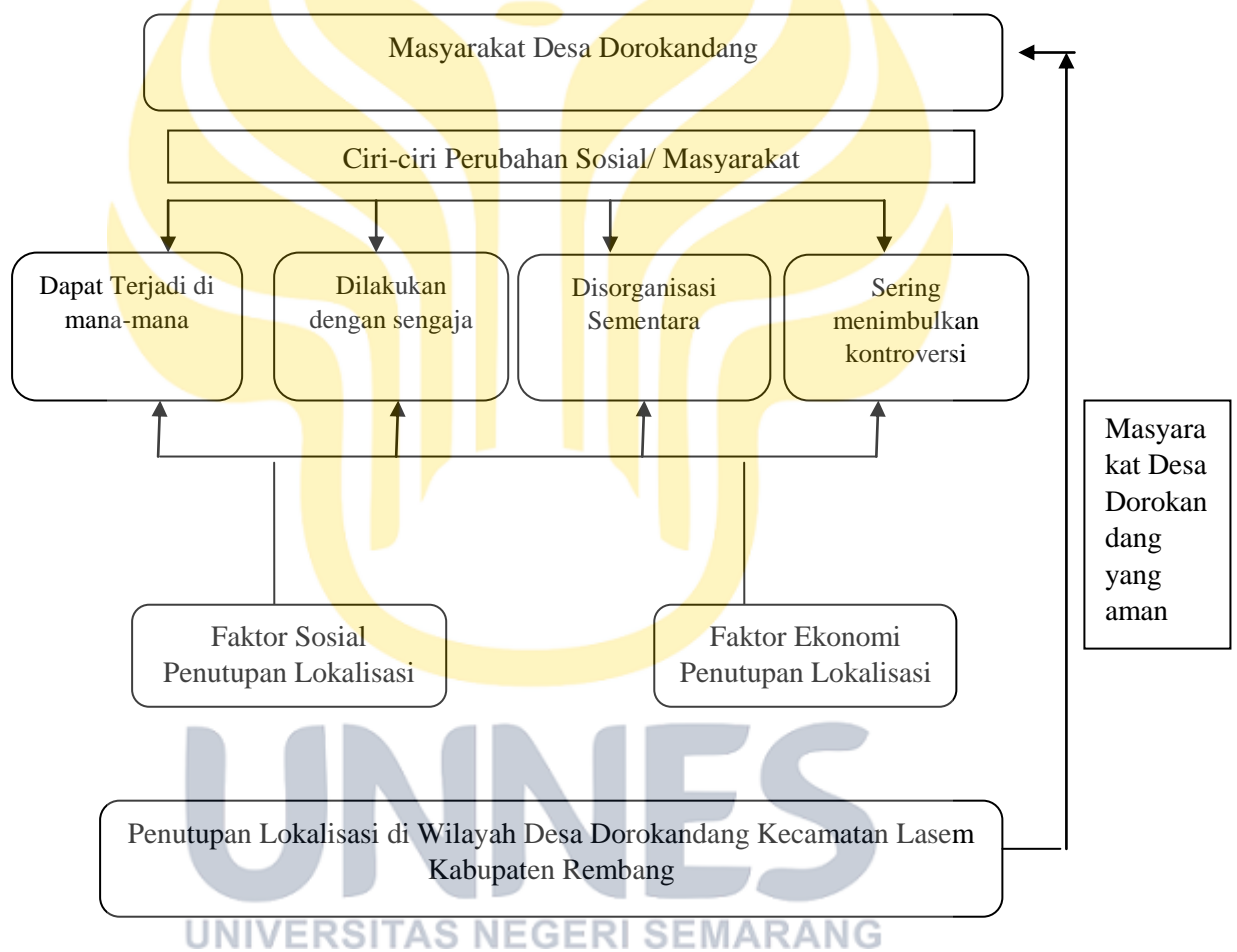
Setiap upaya penutupan lokalisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelumnya telah melalui berbagai pertimbangan dan usaha-usaha dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi. Hal ini menjadi salah satu langkah agar keputusan penutupan lokalisasi bersifat solutif dan dapat diterima oleh semua pihak, khususnya pihak eks mucikari. Begitupula dengan upaya yang dilakukan pemerintah Desa Dorokandang kaitannya dengan usaha-usaha penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan penutupan lokalisasi yang ada di desa tersebut.

Terkait dari aspek perubahan sosial dalam masyarakat, penutupan lokalisasi tentu membawa perubahan bagi pelaku prostitusi maupun masyarakat sekitar lokalisasi. Dampak penutupan lokalisasi membawa perubahan baik dari segi ekonomi maupun sosial. Perubahan-perubahan dari penutupan lokalisasi memberikan pengaruh bagi pola kehidupan sosial maupun ekonomi baik bagi pelaku prostitusi dalam hal ini mucikari maupun masyarakat sekitar lokalisasi.

Adanya penutupan lokalisasi di Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang merupakan salah satu bentuk upaya penanganan masalah sosial berupa praktek prostitusi yang ada di lingkungan masyarakat. Penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dorokandang diharapkan mampu memberikan dampak positif serta menjadi contoh dalam penertiban segala bentuk penyakit sosial bagi daerah-daerah lain. Penutupan lokalisasi ini merupakan upaya untuk menjauhkan Kabupaten Rembang khususnya wilayah Kecamatan Lasem dari citra buruk masyarakat akibat adanya praktek prostitusi. Penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dorokandang melalui beberapa proses dimulai dari proses pendekatan kepada para mucikari, pembekalan keterampilan berupa pelatihan pembuatan batik dan tempe hingga secara resmi ditutup pada tanggal 27 Juni 2017.

Penutupan lokalisasi di wilayah desa Dorokandang membawa dampak khususnya bagi masyarakat sekitar kawasan lokalisasi baik dari segi sosial masyarakat maupun dampak ekonomi. Harapannya dengan

adanya penutupan lokalisasi tersebut bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat maupun bagi semua pihak. Penutupan lokalisasi di Desa Dorokandang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang diharapkan dapat menjadi pintu masuk penertiban penyakit-penyakit sosial baik yang masih ada di daerah Rembang maupun di daerah-daerah lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang dilakukan oleh pihak pemerintah desa setempat dengan beberapa alasan, yaitu faktor sosial masyarakat, faktor agama, faktor ekonomi dan faktor keamanan. Faktor sosial masyarakat serta agama menjadi faktor penguat terhadap penutupan lokalisasi di Desa Dorokandang. Faktor sosial masyarakat adanya penutupan lokalisasi adalah dorongan yang kuat baik dari masyarakat dan juga keinginan dari pihak pemerintah Desa Dorokandang. Keluhan-keluhan masyarakat seringkali disampaikan secara langsung baik kepada Kepala Desa maupun kepada pihak desa. Sedangkan faktor agama yang melatarbelakangi adalah keberadaan lokalisasi yang tidak sesuai dengan kaidah norma agama yang dianut oleh masyarakat. Dukungan kuat penutupan lokalisasi berasal dari pihak MUI Kecamatan Lasem dalam rangka untuk membersihkan Kecamatan Lasem dari penyakit-penyakit masyarakat.
2. Dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi meliputi dampak ekonomi dan dampak sosial bagi mucikari dan pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari keberadaan lokalisasi

di wilayah Desa Dorokandang. Dampak ekonomi sangat dirasakan oleh para eks mucikari dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Para eks mucikari *pasca* penutupan lokalisasi beralih pekerjaan dengan berjualan makanan di rumah, berjualan di pasar dan melanjutkan pelatihan pembuatan tempe di rumah. Dari segi sosial kemasyarakatan, meskipun sebelumnya telah terjadi pro dan kontra terhadap keberadaan lokalisasi bagi masyarakat yang pro tetap menghargai keputusan dari pemerintahan desa. Penutupan lokalisasi di Desa Dorokandang telah memberikan perubahan pada lingkungan “komplek” kawasan tersebut yang mengakibatkan perubahan kehidupan eks mucikari. Dihadapkan pada kehidupan baru, khususnya pada kegiatan pemenuhan kehidupan sehari-hari. Secara garis besar dampak sosial masyarakat khususnya bagi eks mucikari yaitu aktivitas kehidupan mereka setelah penutupan lokalisasi yang mulai berubah.

3. Kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah Desa Dorokandang meliputi kendala sebelum penutupan, selama proses penutupan, dan setelah penutupan lokalisasi. Kendala sebelum penutupan lokalisasi

Kendala yang dialami oleh pemerintah Desa Dorokandang sebelum penutupan adalah benturan antara pihak desa dengan para pemuda dan juga preman-preman yang selama ini mengambil keuntungan dari kawasan lokalisasi. Kendala yang dialami selama proses

penutupan lokalisasi adalah anggapan para mucikari bahwa mereka akan di usir dari Desa Dorokandang. Dari ketakutan-ketakutan tersebut ada beberapa mucikari yang tidak ikut dalam proses penutupan misalnya pada saat program pelatihan keterampilan pembuatan tempe dan juga pembuatan batik. Kendala-kendala yang dialami *pasca* penutupan lokalisasi adalah masih adanya beberapa eks mucikari yang melakukan kegiatan praktik prostitusi secara sembunyi-sembunyi, ini dikarenakan pemeriksaan dari pihak Satpol PP maupun Kepolisian tidak secara rutin. Pemeriksaan di tempat kawasan lokalisasi *pasca* ditutup hanya dilakukan secara beberapa kali dalam seminggu sehingga masih ada eks mucikari yang secara diam-diam melakukan praktek prostitusi.

B. Saran

Adapun beberapa masukan yang dapat peneliti berikan untuk pihak Kecamatan Lasem dan pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Dari pihak Kecamatan Lasem maupun pemerintah Kabupaten Rembang sebaiknya ikut serta berperan dalam menangani kendala *pasca* penutupan lokalisasi dengan mengirimkan pihak Satpol PP untuk pemeriksaan secara rutin di kawasan eks lokalisasi di Desa Dorokandang.

2. Pemerintah Kabupaten Rembang hendaknya memberikan lapangan pekerjaan bagi para eks mucikari sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan secara layak dan tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari.

Beberapa masukan yang dapat peneliti berikan kepada pemerintah Desa Dorokandang maupun masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat seharusnya ikut berperan aktif dalam memantau kawasan lokalisasi *pasca* resmi ditutup dan melaporkan kepada pemerintah Desa Dorokandang apabila masih terjadi kegiatan praktik prostitusi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat seharusnya turut aktif selain adanya pemantaun baik dari pihak desa setempat maupun dari pihak Satpol PP.
2. Pemerintah Desa Dorokandang hendaknya terus melakukan pemantauan kawasan eks lokalisasi dan melakukan pendekatan kepada para eks mucikari agar mereka tidak kembali melakukan praktek prostitusi dengan cara sembunyi-sembunyi.
3. Pemerintah Desa Dorokandang hendaknya juga memprioritaskan segala macam bentuk bantuan dari pemerintah misalnya bantuan beras maupun sembako kepada para eks mucikari agar meringankan beban perekonomian yang dialami. Keputusan penutupan lokalisasi di wilayah Desa Dorokandang hendaknya bersifat solutif bagi semua pihak khususnya bagi para eks mucikari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burlian, Paisol. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marton, Nanang. 2011.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: AlfaBeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2012. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sztompka, Piotr. 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.

Jurnal

- Abdussamad Zuchri dan Amala Ritmon. 2016. 'Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolang Mongodondow Utara'. Dalam *Jurnal Manajemen*. No. 02.
- Amalia, Astry Sandra. 2013. 'Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) terhadap Masyarakat Sekitar'. Dalam *Jurnal Ejournal Administrasi Negara*. No.2. Hal. 465-478.
- Febriani, Dina. 2014. 'Faktor Penyebab Menurunnya Moral Remaja dan Upaya Orang Tua dalam Mengatasinya (Studi di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)'. Dalam *Jurnal Program Studi Bimbingan dan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat Padang*. Hal. 2.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma dan Hilman Yusuf Adam. 2019. 'Relokasi Pekerja Seks Komersial setelah Penutupan Lokalisasi Kedung Banteng'. Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*. No. 1. Hal 1-12.
- Koentjoro. 1996. 'Prostitusi di Indonesia: Sebuah Analisis di Jawa'. Dalam *Jurnal Buletin Psikologi*. No. 2. Hal. 42.
- Kurnianto, Bambang Tri. 2017. 'Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung'. Dalam *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*. Hal. 7-8.
- Kusumastuti, Weny. 2009. 'Dinamika Kognisi Sosial pada Pelacur terhadap Penyakit Menular Seksual'. Dalam *Jurnal Indigenous, Jurnal Ilmiah Berskala Psikologi*. No. 2. Hal. 20-23.

- Mannan, Audah. 2017. 'Pembinaan Moral dalam Membentuk Karakter Remaja (Studi Kasus Remaja Peminum Tuak di Kelurahan Suli Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)'. Dalam *Jurnal Aqidah-Ta*. No. 1. Hal. 60.
- Oktaviari, Nanda Suliandi dan Pambudi Handoyo. 2017. 'Jaringan Sosial Mucikari Pasca Penutupan Lokalisasi Dolly Surabaya'. Dalam *Jurnal Paradigma*. No. 02. Hal. 1.
- Resmiwati. 2010. 'Degradasi Kultural dalam Kehidupan Remaja'. Dalam *Journal Artikel Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Hal. 325-326.
- Retnaningsih, Hartini. 2014. 'Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolly'. Dalam *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial*. No. 13. Hal. 11.
- Rokhmah Dewi dan Khoiron. 2014. 'Dampak Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi terhadap Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember'. Dalam *Jurnal Kebijakan Kesehatan*. Volume 03.
- Sitepu Abdi. 2004. 'Dampak Lokalisasi Prostitusi terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya'. Dalam *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*. No. 3. Hal. 172-176.
- Soetomo. 2011. 'Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Pemecahan Masalah Sosial'. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Nomor 1. Hal. 17.
- Sosiady, Mulia dan Ermansyah. 'Dampak Sosial dan Ekonomi Penutupan Lokalisasi Teleju terhadap Maraknya Panti Pijat dan Implikasinya terhadap Keresahan Masyarakat di Kota Pekanbaru'. Dalam *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau*. Hal. 1-9.
- Sutarmin dan Budiarti Wiwik. 'Dampak Penutupan Lokalisasi terhadap Pendapatan Masyarakat sekitar Lokalisasi di Banyuwangi'. Dalam *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas dr. Soetomo Surabaya*.
- Zulfiqar Janif, Fitriah Nur, dan Paselle Enos. 2014. 'Analisis Kebijakan Penutupan KM 17 di Balikpapan'. Dalam *Balikpapan: E-journal Administrative Reform*. 2 (1). No. 1. Hal. 1199.

Skripsi

- Astuti, Puji Adis. *Kebijakan Walikota Surabaya dalam Penutupan Lokalisasi Dolly Surabaya Tahun 2014*. Skripsi. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fatkhullah, Mukhammad, dkk. *Dampak Praktik Prostitusi terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Lokalisasi Jarak-Dolly Kelurahan Putat Jaya*. Surabaya. Universitas Airlangga.

Pratama, Indra. *Dampak Penutupan Lokalisasi Bangunsari terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Bangunsari Krembangan, Surabaya*. Skripsi. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.

R, Syifa' Urohman F, Suwarno Winarno, Rusdianto Umar. *Pola Interaksi Sosial PSK dengan Masyarakat Sekitar Lokalisasi dan Dampak yang ditimbulkannya di Lokalisasi Klubuk di Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang*. Malang. Universitas Negeri Malang.

Yayan Alex S. 2015. *Dampak Sosial Ekonomi Penutupan Lokalisasi terhadap Masyarakat Puger Tahun 2007-2014*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Internet

Hasanah, Sovia. 2018. *Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK*. <https://m.hukumonline.com> (7 Mei 2019)

Mahmudan dan Fia. 2019. *Prostitusi Online dan Offline, Begini Kata Pakar Hukum*. <https://radarmalang.id>. (11 Juli 2019).

Pengertian Dampak Menurut Para Ahli. <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/> (22 April 2019).

Rehsos, OHH. 2018. *Menuju Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi 2019*. <https://www.kemsos.go.id/berita/menuju-indonesia-bebas-lokalisasi-prostitusi-2019> (22 April 2019)

Reza. 2017. *8 Ciri-ciri Perubahan Sosial dan Contohnya*. <https://materiips.com/ciri-ciri-perubahan-sosial> (11 Juli 2019).

Sutriyono, Edy. 2017. *Lokalisasi di Dorokandang Rembang Bakal ditutup*. <https://www.murianews.com/2017/03/04/109372/lokalisasi-di-dorokandang-rembang-bakal-ditutup.html> (22 April 2019).

Syaefudin, Arif. 2017. *Lokalisasi Dorokandang Resmi ditutup*. <https://www.nurfmrembang.com/berita/lokalisasi-dorokandang-resmi-ditutup> (22 April 2019).

Syaefudin, Ahmad. 2017. *Jelang Puasa Pemkab Rembang Tutup Lokalisasi Dorokandang*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3510596/jelang-puasa-pemkab-rembang-tutup-lokalisasi-dorokandang> (22 April 2019).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda> (22 April 2019).

<https://kbbi.web.id/dampak> (22 April 2019).

<https://www.kamusbesar.com>. (11 Juli 2019).

Catatan Penelitian Dampak Penutupan Lokalisasi.